



# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**TAHUN 2022**



**LKjIP**

**Dinas Perumahan Rakyat,  
Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Kabupaten Nganjuk**

## KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 dibuat sebagai laporan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan merupakan laporan tahun ketiga dari pelaksanaan tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan periode 2018 – 2023. Penyusunan LKjIP Tahun 2022 mengacu kepada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Dengan terselesaikannya LKjIP Dinas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2022 dan pencapaian kinerja secara menyeluruh, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan LKjIP, termasuk kepada pihak-pihak yang memberikan masukan, koreksi guna penyempurnaannya. Demikian halnya dengan segala kekurang sempurnaan yang terdapat pada LKjIP Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, pada kesempatan ini kami sampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya.

Demikian LKjIP Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2022 ini kami susun untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 16 Januari 2023

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,  
Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Kabupaten Nganjuk



**AGUS FRHANNEDY, S.Pd., M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19640901 198703 1 013

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Dasar Hukum, Tugas Pokok dan Fungsi .....	1
1.1.1 Tugas Pokok.....	1
1.1.2 Fungsi.....	1
1.2 Struktur Organisasi.....	5
1.3. Isu strategis / permasalahan utama pembangunan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2021 .....	9
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>11</b>
2.1. Rencana Strategik Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan .....	11
2.1.1 Visi .....	11
2.1.2 Misi .....	11
2.1.3 Tujuan .....	12
2.1.4 Sasaran .....	14
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	13
2.2.1. Sasaran dan Program Pembangunan .....	13
2.2.2. Standar Penilaian Kinerja.....	15
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>16</b>
3.1. Capaian Kinerja .....	16
3.2. Realisasi Anggaran.....	19
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>27</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Administrasi Personil Menurut Golongan .....	8
Tabel 1.2 Data Administrasi Personil Menurut Pendidikan .....	8
Tabel 1.3 Data Administrasi Personil Menurut Jabatan .....	9
Tabel 1.4 Data Aset Dinas .....	9
Tabel 2.1 Sasaran .....	14
Tabel 2.2 Program/Kegiatan 2022 .....	14

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Dasar Hukum, Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit organisasi bersifat khusus Kabupaten Nganjuk, bahwa Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

#### **1.1.1 Tugas Pokok**

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengelolaan, koordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.

#### **1.1.2 Fungsi**

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan dan koordinasi penyediaan infrastruktur bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- c. Pelaksanaan pembinaan umum, teknis dan operasional bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian rencana dan program pembangunan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- e. Pemberian rekomendasi untuk kegiatan yang berkaitan dengan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- f. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;

- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati yang berkaitan dengan tugasnya.

### **Kepala Dinas**

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan koordinasi, pengawasan, ketatausahaan dan membagi tugas kegiatan bawahan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.

#### 1. Sekretariat

Sekretariat Mempunyai tugas memberikan pelayanan administrative dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tatausaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan asn kepada semua unsur di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
- d. Pembinaan aparatur;
- e. Pengelolaan urusan kepegawaian;
- f. Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
- g. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan barang milik negara dan barang milik daerah;
- h. Pembinaan dan koordinasi urusan kepegawaian;
- i. Pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan yang berkaitan dengan tugasnya.

### **Subbagian Umum dan Kepegawaian**

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan urusan persuratan;
- b. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;

- c. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- d. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;
- e. Melaksanakan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional;
- f. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Bidang Perumahan Rakyat

Bidang Perumahan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat.

Bidang Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan penetapan norma, standar, pedoman dan manual (NSPM) di bidang perumahan rakyat;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perumahan rakyat yang meliputi penetapan kebijakan strategis, pengelolaan dan pemeliharaan perumahan rakyat;
- c. Perencanaan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten;
- d. Pelaksanaan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten;
- e. Pembangunan dan rehabilitasi korban bencana atau relokasi program kabupaten;
- f. Pendistribusian dan serah terima korban bencana atau relokasi program kabupaten;
- g. Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus;
- h. Penerbitan izin pengembangan dan pembangunan perumahan;
- i. Penerbitan Sertifikat Izin Kepemilikan Gedung (SKGB);
- j. Peningkatan Prasarana, Sarana Utilias (PSU) umum;
- k. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan rakyat;
- l. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);

- m. Pelaksanaan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU umum tingkat kemampuan kecil;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan yang berkaitan dengan tugasnya.

### 3. Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang permukiman dan pertanahan.

Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kawasan permukiman dan pertanahan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kawasan permukiman dan pertanahan;
- c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- d. Penataan dan peningkatan kawasan kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha;
- e. Pemberian ijin lokasi dalam 1 (satu) kabupaten dalam rangka penanaman modal dan kemudahan berusaha;
- f. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
- g. Penyelesaian masalah tanah kosong, pengelolaan izin membuka tanah dan penatagunaan tanah;
- h. Pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong;
- i. Penerbitan izin membuka tanah;
- j. Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu kabupaten; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang berkaitan dengan tugasnya.

#### **Seksi Pertanahan**

Seksi Pertanahan mempunyai tugas;

- a. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemberian ijin lokasi dalam rangka penanaman moda dan kemudahan berusaha;



- b. Melaksanakan inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) Daerah;
- c. Melaksanakan mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) Daerah;
- d. Melaksanakan penetapan daftar masyarakat penerima santunan tanah dalam 1 (satu) Daerah;
- e. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
- f. Melaksanakan inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah;
- g. Melaksanakan inventarisasi dan rekomendasi objek redistribusi tanah;
- h. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan redistribusi tanah objek reforma agrarian dalam 1 (satu) kabupaten;
- i. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penataan akses dalam pemanfaatan redistribusi tanah dalam 1 (satu) kabupaten;
- j. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian tanah kosong di dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- k. Melaksanakan inventarisasi tanah kosong;
- l. Melaksanakan pemanfaatan tanah kosong;
- m. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin membuka tanah;
- n. Melaksanakan pengendalian pemanfaatan tanah negara;
- o. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah;
- p. Melaksanakan pemetaan zona nilai tanah kewenangan kabupaten;
- q. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kabupaten;
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

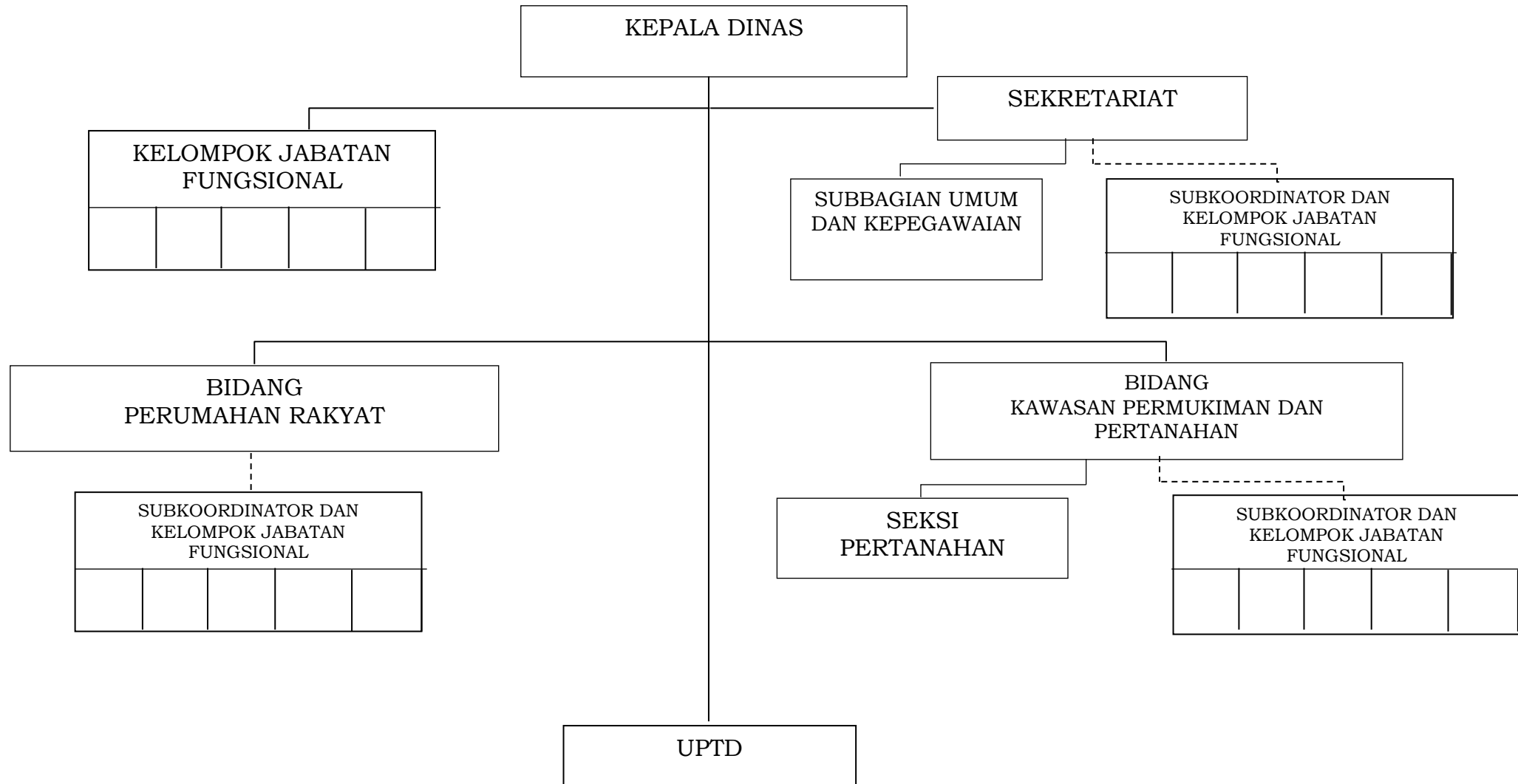
## **1.2 Struktur Organisasi**

Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2) Subkoordinator dan kelompok jabatan fungsional.

- c. Bidang Perumahan Rakyat, membawahi :
  - 1) Subkoordinator dan kelompok jabatan fungsional.
- d. Bidang Permukiman dan Pertanahan, membawahi :
  - 1) Seksi Pertanahan.
  - 2) Subkoordinator dan kelompok jabatan fungsional.
- a. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN NGANJUK**



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya saat ini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk didukung oleh personil dan perlengkapan sebagai berikut :

a. Personil :

Tabel 1.1: Data Administrasi Personil  
Menurut Golongan

URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1. Golongan I	Orang	9
2. Golongan II	Orang	22
3. Golongan III	Orang	15
4. Golongan IV	Orang	4
5. Non ASN	Orang	8
Jumlah	Orang	58

Data : per Des 2022

Tabel 1.2 : Data Administrasi Personil  
Menurut Pendidikan

URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1. SD dan SLTP	Orang	9
2. SLTA	Orang	20
3. D2	Orang	1
4. D3	Orang	4
5. SI	Orang	20
6. S2	Orang	4
7. S3	Orang	-
Jumlah	Orang	58

Data : per Des 2022

Tabel 1.3: Data Administrasi Personil  
Menurut Jabatan

URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1. Eselon II	Orang	1
2. Eselon III	Orang	3
3. Eselon IV	Orang	1
4. Jabatan Fungsional Penyetaraan	Orang	5
5. Jabatan Fungsional	Orang	2
6. Staf	Orang	38
7. THL	Orang	8
Jumlah	Orang	58

Data : per Des 2022

b. Perlengkapan

Tabel 1.4: Data Aset Dinas

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	Mobil Dinas	Unit	4
2	Sepeda motor	Unit	11
3	Tanah	Bidang	2
4	Bangunan Gedung	Unit	2

Data : per Des 2022

**1.3. Isu strategis / permasalahan utama pembangunan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2021**

**Permasalahan Internal :**

- a. Kurang tertibnya penanganan pengendalian dokumen kegiatan yang sudah dilaksanakan sehingga terjadi keterlambatan bila diperlukan untuk penyusunan laporan.
- b. Kurang tepatnya penyusunan program kegiatan dengan rencana pencairan keuangan sehingga pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu.
- c. Rendahnya kompetensi beberapa SDM.

**Permasalahan Eksternal :**

- a. Tuntutan masyarakat dalam pelayanan Penyediaan Rumah Layak Huni.
- b. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau.
- c. Menurunnya kualitas lingkungan permukiman dan meningkatnya luasan kawasan kumuh.
- d. Masih terbatasnya penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman dikawasan tertinggal, dan dikawasan pinggiran hutan di perdesaan
- e. Masih belum efektifnya penerapan konsep pengendalian permukiman melalui dukungan prasarana dan sarana dasar permukiman Kasiba/Lisiba.
- f. Kurangnya penyiapan dan penyediaan lahan untuk perumahan yg dikelola oleh pemerintah daerah
- g. Memburuknya kualitas fisik kawasan perkotaan, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat perkotaan karena keterbatasan pelayanan kebutuhan dasar perkotaan yang berdampak menambah luasan kawasan kumuh perkotaan, hal ini lebih-lebih dipicu dengan adanya pertumbuhan PKL yang tidak terkendali
- h. Calon lahan pengganti untuk tukar menukar kawasan hutan dengan lahan resettlement warga terdampak pembangunan bendungan semantok banyak yang belum clean & clear.n

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Strategik Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

##### **2.1.1 Visi**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Nganjuk maka Visi pembangunan yang menjadi acuan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk adalah :

*“Terwujudnya Kabupaten Nganjuk Yang Maju dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Mbangun Deso Noto Kutho).”*

##### **2.1.2 Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan.

Misi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk mencapai Visi dalam RPJMD 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
2. Meningkatkan kinerja Birokrasi bersih, profesional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.
3. Meningkatkan kualitas, pelayanan dan mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.
4. Meningkatkan keberpihakan Pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal.
5. Meningkatkan pembangunan sektor pariwisata dan sektor produktif lainnya yang didukung pengembangan kebanggaan terhadap kesenian dan kebudayaan berbasis kearifan lokal serta teknologi tepat guna.

6. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh Visi, maka Misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

**Misi 6 :**

***“Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana”***

**2.1.3 Tujuan**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk melalui penentuan visi dan misi KDH dan Wakil KDH terpilih adalah ***“Meningkatkan Insfrastruktur dasar perumahan dan permukiman”***.

**2.1.4 Sasaran**

Dari tujuan yang telah ditentukan, kemudian dijabarkan dalam bentuk sasaran yang mudah terukur dengan rumusan-rumusan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tujuan “Meningkatkan Insfrastruktur dasar perumahan dan permukiman” dijabarkan dalam sasaran Meningkatnya Perumahan dan Permukiman yang layak huni dan Meningkatnya Penyelesaian Masalah Pertanahan



## 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

### 2.2.1. Sasaran dan Program Pembangunan

Sasaran dan program pembangunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk yang ingin dicapai pada tahun 2022 sebanyak 2 sasaran dengan 3 indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Sasaran**

Sasaran	Indikator	Target (%)
1	2	3
Meningkatnya Perumahan dan Permukiman yang layak huni	Persentase Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh	47,5
	Persentase ketersediaan rumah layak huni	92,96
Meningkatnya Penyelesaian Masalah Pertanahan	Persentase permasalahan pertanahan dalam kabupaten yang ditindaklanjuti	100

**Tabel 2.2 Program/Kegiatan Tahun 2022**

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	<b>Program Penyelenggaraan Jalan</b>	<b>2.756.174.293,-</b>
	1) Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	2.756.174.293,-
2.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>7.815.919.782,-</b>
	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.540.000,-
	2) Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.626.782.000,-
	3) Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	123.035.000,-
	4) Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	396.390.960,-
	5) Pengadaan Barang Milik Daerah	66.850.000,-
	6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.133.047,-

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
	7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	421.188.775,-
3.	<b>Program Pengembang Perumahan</b>	<b>8.263.439.722,-</b>
	1) Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	170.080.000,-
	2) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	7.990.359.722,-
	3) Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	19.000.000,-
	4) Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	84.000.000,-
4.	<b>Program Kawasan Permukiman</b>	<b>2.011.381.950,-</b>
	1) Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	50.000.000,-
	2) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.961.381.950,-
5.	<b>Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh</b>	<b>5.808.368.900,-</b>
	1) Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	5.808.368.900,-
6.	<b>Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</b>	<b>1.468.284.000,-</b>
	1) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.468.284.000,-

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
7.	<b>Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman</b> 1) Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	<b>13.711.000,-</b>  13.711.000,-
8.	<b>Program Penatagunaan Tanah</b> 1) Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	<b>1.118.637.650,-</b>  1.118.637.650,-
<b>Jumlah</b>		<b>29.255.917.297,-</b>

### 2.2.2. Standar Penilaian Kinerja

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk, maka sesuai kesepakatan pada saat penyusunan Rencana Kinerja pada awal tahun telah kami tetapkan standar pencapaian sebagai berikut :

Nilai Capaian (dalam %)	Kategori Pencapaian Sasaran
80 – lebih dari 100	Tercapai
60 – 79	Kurang Tercapai
Kurang dari 60	Tidak Tercapai

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban penyelenggara pemerintahan untuk melaporkan serta mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi serta pencapaian tujuan strategik dan sasaran-sasaran periodik yang diukur berdasarkan seperangkat indikator kinerja non keuangan (*performance indicators*) atau tingkat capaian program.

#### 3.1. Capaian Kinerja

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk melakukan evaluasi dan penilaian terhadap tingkat keberhasilan dan ketidak-berhasilan pencapaian sasaran guna meningkatkan kinerja organisasi.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidak-berhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja.

Dari 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan dalam RKT tahun 2022, dua sasaran sudah tercapai. Adapun capaian sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Sasaran	Pencapaian		
		Tercapai	Kurang Tercapai	Tidak Tercapai
1	Meningkatnya Perumahan dan Permukiman yang layak huni	√		
2	Meningkatnya Penyelesaian Masalah Pertanahan	√		

Capaian sasaran tersebut dapat diketahui dengan terpenuhinya indikator sasaran sebagai berikut :

SASARAN		INDIKATOR SASARAN		CAPAIAN KINERJA		
				Target %	Realisasi %	Capaian %
1.	Meningkatnya Perumahan dan Permukiman yang layak huni	1.	Persentase Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh	47,5	47,82	100,67
		2.	Persentase ketersediaan rumah layak huni	92,96	86,22	92,74
2.	Meningkatnya Penyelesaian Masalah Pertanahan	1.	Persentase permasalahan pertanahan dalam kabupaten yang ditindaklanjuti	100	100	100

Sasaran "Meningkatnya Perumahan dan Permukiman yang layak huni dan Meningkatkan Penyelesaian Masalah Pertanahan", diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1.1. Persentase pengurangan kawasan kumuh menggambarkan upaya pemerintah daerah dalam mengurangi kawasan kumuh di perkotaan sehingga layak untuk dihuni dan meningkatkan kenyamanan lingkungan.

Kinerja pelayanan pengurangan kawasan kumuh diukur berdasarkan luas kawasan kumuh yang tertangani di kabupaten dibagi dengan luas total kawasan kumuh yang ditetapkan di kabupaten tersebut.

Capaian kinerja selama tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Luas kawasan kumuh sesuai SK Bupati Nganjuk  
Nomor 188/208/K/411.012/2020 131,2 Ha
- Persentase pengurangan kawasan kumuh s.d. akhir tahun 2022 47,50%
- Realisasi pengurangan kawasan kumuh s.d tahun 2022 62,74 Ha
- Persentase realisasi pengurangan kawasan kumuh s.d. akhir tahun 2022 47,82 %
- Persentase capaian kinerja tahun 2022 100,67%

Persentase target pengurangan kawasan kumuh sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 47,50 % dengan realisasi seluas 62,74,00 Ha atau sebesar 47,82 % dari total 131,2 Ha luas kawasan kumuh sesuai SK Bupati Nganjuk Nomor 188/208/K/411.012/2020. Capaian kinerjanya adalah sebesar 100,67 %.

1.2. Persentase ketersediaan rumah layak huni menggambarkan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Kinerja pelayanan ketersediaan rumah layak huni diukur berdasarkan jumlah rumah layak huni dibagi dengan jumlah seluruh rumah.

Capaian kinerja selama tahun 2022 adalah sebagai berikut :

– Jumlah rumah s.d.akhir tahun 2022	327.281 unit
– Persentase target rumah layak huni s.d. akhir tahun 2021	92,96%
– Jumlah rumah layak Huni s.d. akhir tahun 2021	281.761 unit
– Realisasi penanganan rumah tidak layak huni pada tahun 2022	419 unit
– Jumlah rumah layak Huni s.d. akhir tahun 2022	282.180 unit
– Jumlah rumah tidak layak huni s.d. akhir tahun 2021	45.101 unit
– Persentase realisasi rumah layak huni s.d. akhir tahun 2021	86,22 %
– Persentase capaian kinerja tahun 2021	92,75 %

Persentase target rumah layak huni yang difasilitasi pemerintah daerah sampai dengan tahun 2022 sebesar 92,96%, realisasi jumlah rumah layak huni sampai akhir tahun 2022 adalah 282.180 unit atau 86,22 % sehingga capaian kinerja sebesar 92,75%.

Program kegiatan yang dilaksanakan tahun 2022 untuk mencapai indikator sasaran Persentase rumah layak huni adalah :

- Program BSPRS, hasilnya pemugaran rumah sebanyak 99 unit
- Pemugaran Rumah Tidak Layak huni (RTLH) sebanyak 205 unit
- DAK bidang Perumahan sebanyak 27 unit
- PAK (optimasi) sebanyak 88 unit

Indikator sasaran/kinerja dalam sasaran “ Meningkatkan Perumahan dan Permukiman yang layak huni” dan ” Meningkatkan Penyelesaian Masalah Pertanahan” pada Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan

Dengan Pelayanan Dasar dengan indikator Persentase ketersediaan rumah layak huni menghasilkan nilai capaian 92,75% berdasarkan skala ordinal, sehingga predikat pencapaian sasaran yang diperoleh termasuk dalam kategori “**Tercapai**”, kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah berhasil Meningkatkan Perumahan dan Permukiman yang layak huni di wilayah kabupaten Nganjuk sebagaimana yang ditargetkan dalam tahun 2022.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020, 2021 dan 2022 serta perbandingan dengan Target Akhir Renstra (2023) dan Target Nasional:

Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja (%)			Target Akhir Renstra	Target Nasional
	2020	2021	2022	2023	
1 Persentase Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh	-	21,24	47,82	58,8	
2 Persentase ketersediaan rumah layak huni	86,98	86,62	86,22	93,21	
3 Persentase permasalahan pertanahan dalam kabupaten yang ditindaklanjuti	-	-	100	100	

### 3.2. Realisasi Anggaran

Upaya pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk dengan program-program dan realisasi anggaran sampai akhir tahun 2022 sebagai berikut :

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Program Penyelenggaraan Jalan	<b>2.756.174.293,-</b>	<b>2.756.174.293,-</b>	<b>100%</b>
	1) Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	2.756.174.293,-	2.756.174.293,-	100%

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>7.815.919.782,-</b>	<b>6.792.119.730,-</b>	<b>86,90%</b>
	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.540.000,-	45.646.000,-	80,73%
	2) Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.626.782.000,-	5.692.925.079,-	85,91%
	3) Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	123.035.000,-	120.750.000,-	98,14%
	4) Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	396.390.960,-	383.217.479,-	96,68%
	5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	66.850.000,-	66.798.500,-	99,92%
	6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.133.047,-	80.778.709,-	64,55%
	7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	421.188.775,-	402.003.963,-	95,45%
3.	<b>Program Pengembang Perumahan</b>	<b>8.263.439.722,-</b>	<b>7.568.693.082,-</b>	<b>91,59%</b>
	1) Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	170.080.000,-	146.655.400,-	86,23%
	2) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	7.990.359.722,-	7.336.477.369,-	91,82%
	3) Pembinaan Pengelolaan	19.000.000,-	11.351.500,-	59,74%



No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
	Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			
	4) Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	84.000.000,-	74.208.813	88,34%
4.	<b>Program Kawasan Permukiman</b>	<b>2.011.381.950,-</b>	<b>1.746.016.098,-</b>	<b>86,81%</b>
	1) Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	50.000.000,-	20.626.950,-	41,25%
	2) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.961.381.950,-	1.725.389.148,-	87,97%
5.	<b>Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh</b>	<b>5.808.368.900,-</b>	<b>5.555.814.867,-</b>	<b>95,65%</b>
	1) Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	5.808.368.900,-	5.555.814.867,-	95,65%
6.	<b>Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</b>	<b>1.468.284.000,-</b>	<b>1.432.687.421,-</b>	<b>97,58%</b>
	1) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.468.284.000,-	1.432.687.42,-1	97,58%

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
7.	<b>Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman</b>	<b>13.711.000,-</b>	<b>8.284.650,-</b>	<b>60,42%</b>
	1) Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	13.711.000,-	8.284.650,-	60,42%
8.	<b>Program Penatagunaan Tanah</b>	<b>1.118.637.650,-</b>	<b>839.832.185,-</b>	<b>75,08%</b>
	1) Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	1.118.637.650,-	839.832.185,-	75,08%
<b>JUMLAH</b>		<b>29.255.917.297,-</b>	<b>26.699.622.326</b>	<b>91,26%</b>

➤ Alokasi per sasaran pembangunan tahun 2022 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Persentase Anggaran
1	Meningkatnya Perumahan dan Permukiman yang layak huni	Persentase Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh	930.391.950,-	3,18%
		Persentase ketersediaan rumah layak huni	6.773.368.900,-	23,15%
2	Meningkatnya Penyelesaian Masalah Pertanahan	Persentase permasalahan pertanahan dalam kabupaten yang ditindaklanjuti	1.118.637.650,-	3,82%
<b>Total anggaran</b>			<b>8.822.398.500,-</b>	

## Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
<b>Program Penyelenggaraan Jalan</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>2.756.174.293</b>	<b>2.756.174.293</b>	<b>100%</b>
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		100%	100%	100%	2.756.174.293	2.756.174.293	100%
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</b>	<b>90%</b>	<b>78,98%</b>	<b>87,76%</b>	<b>7.815.919.782</b>	<b>6.792.119.730</b>	<b>86,90%</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, anggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	9 dokumen	8 dokumen	88,89%	56.540.000	45.646.000	80,73%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	6 dokumen	6 dokumen	100,00%	6.626.782.000	5.692.925.079	85,91%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dipenuhi	58 Orang	50 Orang	86,21%	123.035.000	120.750.000	98,14%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi dan koordinasi bagian umum yang dilaksanakan	3 paket	3 paket	100,00%	396.390.960	383.217.479	96,68%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	48 Unit	48 Unit	100,00%	66.850.000	66.798.500	99,92%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase kegiatan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan	100%	60,41%	60,41%	125.133.047	80.778.709	64,55%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	9 Unit	9 Unit	100,00%	421.188.775	402.003.963	95,45%
<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>Persentase pengurangan backlog rumah</b>	<b>95%</b>	<b>87,01%</b>	<b>91,59%</b>	<b>8.263.439.722</b>	<b>7.568.693.082</b>	<b>91,59%</b>

Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	5 dokumen	4 dokumen	80,00%	170.080.000	146.655.400	86,23%
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah unit rumah pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program kabupaten/Kota	8 paket	8 paket	100,00%	7.990.359.722	7.336.477.369	91,82%
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	jumlah laporan Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	10 laporan	10 laporan	100,00%	19.000.000	11.351.500	59,74%
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah dokumen laporan Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan	15 dokumen	15 dokumen	100,00%	84.000.000	74.208.813	88,34%
<b>Program Kawasan Permukiman</b>	<b>Persentase pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman</b>	<b>97%</b>	<b>82,81%</b>	<b>85,37%</b>	<b>2.011.381.950</b>	<b>1.746.016.098</b>	<b>86,81%</b>
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah laporan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1 laporan	1 laporan	100%	50.000.000	20.626.950	41,25%
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Pesentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	97%	86,22%	88,89%	1.961.381.950	1.725.389.148	87,97%
<b>Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh</b>	<b>Persentase perbaikan rumah dan kawasan permukiman kumuh</b>	<b>95%</b>	<b>91,29%</b>	<b>96,09%</b>	<b>5.808.368.900</b>	<b>5.555.814.867</b>	<b>95,65%</b>
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	jumlah unit rumah Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota	293 Unit Rumah	293 Unit Rumah	100%	5.808.368.900	5.555.814.867	95,65%

Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
<b>Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)</b>	<b>Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU</b>	<b>100%</b>	<b>97,58%</b>	<b>97,6%</b>	<b>1.468.284.000</b>	<b>1.432.687.421</b>	<b>97,58%</b>
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Terfasilitasinya Penyelenggaraan PSU Perumahan	100%	97,58%	97,58%	1.468.284.000	1.432.687.421	97,58%
<b>Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman</b>	<b>Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman yang ditingkatkan</b>	<b>100%</b>	<b>60,42%</b>	<b>60,42%</b>	<b>13.711.000</b>	<b>8.284.650</b>	<b>60,42%</b>
Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Jumlah Laporan Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil	5 Laporan	5 Laporan	100%	13.711.000	8.284.650	60,42%
<b>Program Penatagunaan Tanah</b>	<b>Persentase perencanaan penggunaan tanah</b>	<b>95%</b>	<b>71,32%</b>	<b>75,07%</b>	<b>1.118.637.650</b>	<b>839.832.185</b>	<b>75,08%</b>
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/kota	3 dokumen	3 dokumen	100%	1.118.637.650	839.832.185	75,08%

## Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Perumahan dan Permukiman yang layak huni	Persentase Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh	100,67	71,74	140,33
		Persentase ketersediaan rumah layak huni	92,74	97,36	95,25
2	Meningkatnya Penyelesaian Masalah Pertanahan	Persentase permasalahan pertanahan dalam kabupaten yang ditindaklanjuti	100	75,08	133,19

Kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun 2022 :

No	Kegiatan
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk tahun 2022 merupakan laporan kinerja pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang menganalisis pencapaian kinerja kegiatan dan program kerja serta evaluasi dan analisis pencapaian 2 (dua) sasaran Renstra.
  
2. Untuk mencapai Sasaran "Meningkatnya Perumahan dan Permukiman yang layak huni dan Meningkatnya Penyelesaian Masalah Pertanahan" Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menetapkan beberapa indikator dengan capaian sebagai berikut :
  - a). Persentase target pengurangan kawasan kumuh sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 47,50 % dengan realisasi seluas 62,74,00 Ha atau sebesar 47,82 % dari total 131,2 Ha luas kawasan kumuh sesuai SK Bupati Nganjuk Nomor 188/208/K/411.012/2020. Capaian kerjanya adalah sebesar 100,67 %.
  - b). Persentase target rumah layak huni yang difasilitasi pemerintah daerah sampai dengan tahun 2022 sebesar 92,96%, realisasi jumlah rumah layak huni sampai akhir tahun 2022 adalah 282.180 unit atau 86,22 % sehingga capaian kinerja sebesar 92,75%.

Sehingga pada “Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar” dengan indikator Persentase ketersediaan rumah layak huni menghasilkan nilai capaian 92,75% dan termasuk dalam kategori “**tercapai**”.
  
3. Rencana antisipasi yang akan dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk mengatasi berbagai masalah pada tahun sebelumnya yaitu :
  - Mempercepat pembentukan kepanitian kegiatan (PPK, PPTK, PPBJ, PPHP dan Pengawas).
  - Mempercepat proses perencanaan (survey, RAB, gambar dan lain-lain)
  - Menyegerakan pelaksanaan lelang (umum dan pengadaan langsung)

4. Penerapan sistem AKIP yang baik tersebut akan sangat berperan dalam meningkatkan perwujudan budaya akuntabilitas kinerja pada karyawan/karyawati Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan guna mewujudkan good governance.